

RINGKASAN

Dimas Wicaksono, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Desember 2016, OPTIMALISASI PELAYANAN KEPABEANAN ATAS FASILITAS KAWASAN BERIKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2013 TENTANG KAWASAN BERIKAT (Studi Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan), Prof.Dr.Sudarsono, S.H., M.S., Dr.Shinta Hadiyantina S.H., M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Optimalisasi Pelayanan Kepabeanan Atas Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 120/PMK.04/2013 Tentang Kawasan Berikat di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Hal ini dilatar belakangi dengan semakin meningkatnya arus perdagangan yang terjadi pada era globalisasi saat ini dimana dalam hal ini pentingnya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan Pelayanan dan Pengawasan sebagaimana tugas yang dilaksanakan, yaitu *Trade Fascilitation, Industrial Assisten, Community Protection, dan Revenue Collection*. Keempat tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berjalan seimbang serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam melaksanakan pelayanan pabean terhadap pengguna jasa di kawasan berikat. Pelayanan pabean di kawasan berikat tersebut mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 Tentang Kawasan Berikat. Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan belum optimal dalam pelayanan pabean. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya gangguan teknis pada sistem kepabeanan dan cukai yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan pabean. Kemudian juga terjadi ketidaksesuaian dengan Standart Operasional Prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pelayanan pabean.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah optimalisasi pelayanan kepabeanan atas fasilitas di kawasan berikat yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan berdasarkan PMK No.12/PMK.04/2013 Tentang Kawasan Berikat, serta apa kendala atas pelayanan yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC) Pasuruan terkait fasilitas di kawasan berikat dan bagaimana upaya atas kendala tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Jenis data dan sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, sumber data diperoleh dari para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil KPPBC Tipe Madya Pabean